

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN BARANG MILIK
NEGARA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) KANTOR WILAYAH
KEMENKUMHAM SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar S-1
Ilmu Administrasi Negara**



**Oleh :
ROSALIA MARFIRA
07011181419034**

Konsentrasi Administrasi Keuangan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
APRIL 2018**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN BARANG MILIK
NEGARA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) KANTOR WILAYAH
KEMENKUMHAM SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar S-1
Ilmu Administrasi Negara**


**Oleh :
ROSALIA MARFIRA
0701181419034**

Telah Doretujui oleh Dosen Pembimbing, 11 April 2018

Pembimbing I

Prof.Dr.Kgs.M.Sobri,M.Si

NIP.19631106 199003 1001



Pembimbing II

Ermanovida,S.Sos.,M.Si

NIP.19691119 199803 2001



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Efektivitas Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan” telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 19 April 2018.

Palembang, 25 April 2018

Ketua:

1. Prof.Dr.Kgs.M.Sobri
NIP.196311061990031101

Anggota:

1. Ermanovida, S.Sos.,M.Si
NIP. 196911191998032001

2. Drs. Gatot Budiarto,MS
NIP. 195806091984031002

3. Dr.M.Husni Thamrin
NIP. 196406061992031001

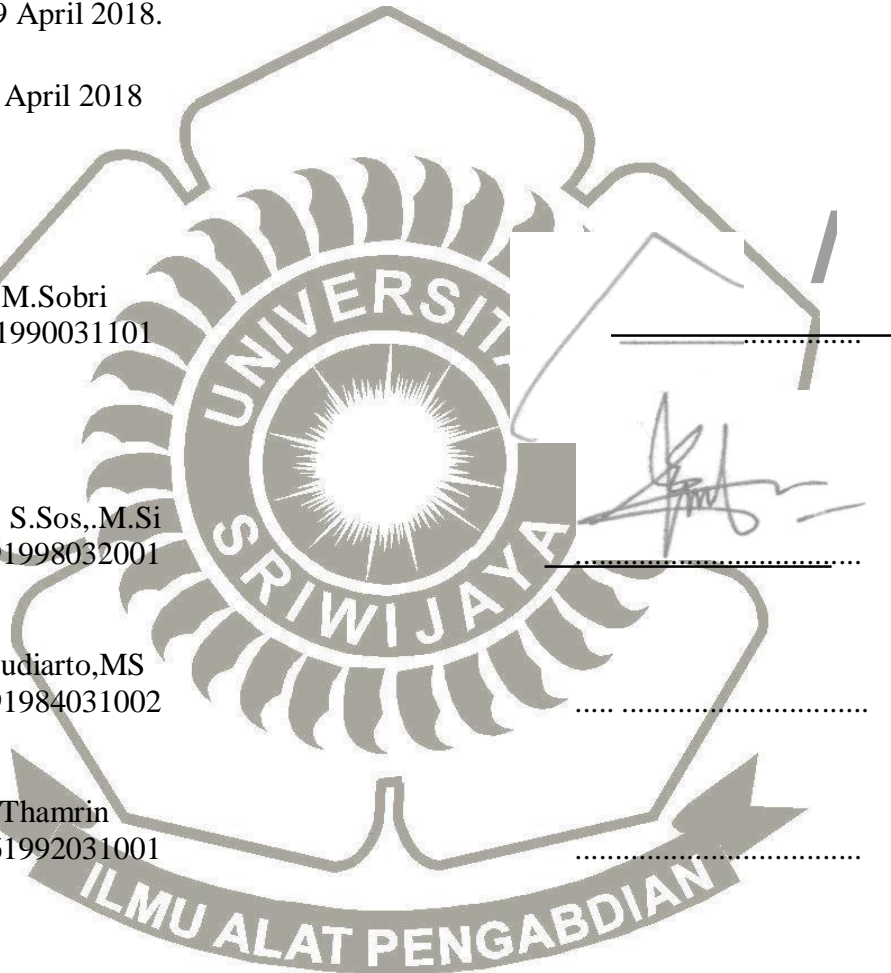
Mengetahui:

Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri,M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Zailani Surya Marpaung,S.Sos.,M.Si
NIP. 198108272009121002

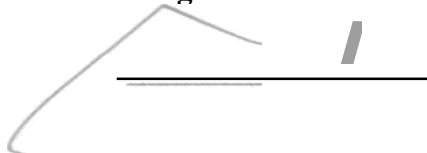


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Efektivitas Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel”. Tujuan penelitian ini ialah untuk menggambarkan pemanfaatan barang milik negara dalam meningkatkan PNBP di Kanwil Kemenkumham Sumsel. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam dan didukung oleh data dokumentasi dan observasi. Prinsip utama pemanfaatan barang milik negara ialah barang tersebut tidak digunakan untuk kegiatan operasional. Selain itu, tujuan utama pemanfaatan barang milik negara ialah untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pemanfaatan barang milik negara pada Kanwil Kemenkumham Sumsel didominasi oleh sewa rumah dinas yang dilakukan oleh 25 dari 27 satuan kerjanya. Hal itupun berdampak pada PNBP Kanwil Kemenkumham Sumsel secara menyeluruh yang masih rendah. Lapas Wanita Klas IIA Palembang merupakan salah satu satuan kerja Kanwil Kemenkumham Sumsel yang melakukan pemanfaatan barang milik negara pada bangunan dan tanahnya sehingga pemanfaatan barang milik negara dapat meningkatkan PNBP Lapas Wanita Klas IIA Palembang. Berbeda dengan Rupbasan Klas I Palembang yang hanya memanfaatkan rumah dinas sebagai pemasukan dalam PNBP nya, sehingga penerimaan negara bukan pajak yang diterima oleh Rupbasan masih rendah. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan barang milik negara di Kanwil Kemenkumham Sumsel mempengaruhi PNBP yang didapat. barang milik negara yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Sumsel yang dimanfaatkan tidak banyak, mengakibatkan PNBP yang dihasilkan tidak cukup besar.

Kata Kunci : Efektivitas, Pemanfaatan Barang Milik Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pembimbing I



Prof.Dr.Kgs.M.Sobri
NIP.196311061990031001

Pembimbing II



Ermanovida,S.Sos.,M.Si
NIP.196911191998032001

Inderalaya, 25 April 2018
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



ZailaniSuryaMarpaung,S.Sos.,M.PA

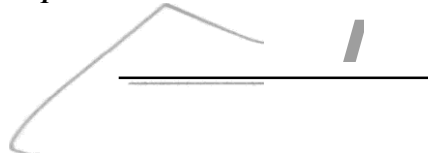
NIP.198108272009121002

ABSTRACT

This thesis entitled “Effectiveness of The Under-Utilized of State-Owned Assets in Increasing Non-tax State Revenue Human Rights Ministry Regional of South Sumatera.” The Purpose of this thesis is to describe how Human Rights Ministry Regional of South Sumatera do their under-utilized assets in increasing non-tax state revenue. This thesis use qualitative research method with in depth-interview and supported by observation and documentation data. The main principles of under-utilization state-owned asset is those property does not use for organisation’s daily activity. Moreover, the purpose of utilization state-owned asset is increasing Non-Tax State Revenue. The under-utilization state property on Human Rights Ministry Regional of South Sumatera is dominated by rental of official house that done by 25 of 27 work unit of Human Rights Ministry Regional of South Sumatera. It has an impact on overall Human Rights Ministry Regional of South Sumatera’s Non-tax State Revenue. Prison Women class IIA Palembang is one of work unit of Human Rights Ministry Regional of South Sumatera which do the utilization on its building and land so it can increase Prison Women class IIA Palembang’s Non-tax State Revenue. The other work unit on Human Rights Ministry Regional of South Sumatera is Confiscated storages and Seized House Class I Palembang which do the utilization on its official house only, so it get The lower non-tax state revenue. The conclusion based on this statement is The under-utilization state-owned property on Kanwil Kemenkum Sumsel is impacted to its Non-Tax State Revenue. Under-utilized assets which is utilized by Human Rights Ministry Regional of South Sumatera is not much, and The Non-Tax State Revenue that it get is not much.

Key Word : Effectiveness, The under-Unitization State-Owned Property, Non-Tax Sate Revenue

Supervisor I



Prof. Dr. Kgs. M. Sobri
NIP.196311061990031001

Supervisor II



Ermanovida, S. Sos., M. Si
NIP.196911191998032001

Inderalaya, 25th April 2018
Chairman of Department of Public Administration
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S. Sos., M. PA

NIP 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah S.W.T yang telah memberikan saya kesempatan dan anugrah untuk bisa menyelesaikan skripsi yang judul “**Efektivitas Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan**”. Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kurikulum pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Selama masa pembuatan skripsi ini, penulis menyadari banyak memperoleh bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga proposal usulan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada ;

1. Bapak Prof.Dr.M.Sobri,M.Si sebagai dosen pembimbing pertama serta Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
2. Ibu Ermanovida,S.Sos.,M.Si sebagai dosen pembimbing kedua saya yang telah member waktu, bimbingan dan ilmu-ilmu yang berguna bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr.Raniasa Putra,M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
4. Ibu Dra.Martina,M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
5. Ibu Hoiron Nisyak,S.pd.,M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademis
6. Kedua Orang tua saya yang selalu mendukung dan memotivasi saya dalam hal apapun, termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-Teman yang telah memberikan masukan serta saran yang dapat membuat saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Indralaya, April 2018

Rosalia Marfira

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN TIM PEMBIMBING	i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Keuangan Negara.....	10
2.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).....	12
2.1.3 Barang Milik Negara	14
2.1.4 Pemanfaatan Barang Milik Negara	17
2.1.5 Teori Efektivitas.....	21
2.2 Teori Efektivitas yang Digunakan	25
2.3 Kerangka Teori	25
2.4 Jadwal Penelitian.....	27
2.5 Penelitian Terdahulu	28
2.6 Kerangka Penelitian	29
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Definisi Konsep	30

3.3 Fokus Penelitian.....	32
3.4 Data dan Sumber Data.....	33
3.5 Informan Penelitian.....	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data	35
3.7 Teknik Analisis Data.....	36
3.8 Teknik Pemeriksaan Data.....	37
3.9 Sistematika Penulisan.....	39
BAB IV	
GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum	41
4.1.1 Sejarah Singkat Kanwil Kemenkumham Sumsel	41
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kanwil Kemenkumham Sumsel	42
4.1.3 Visi dan Misi Kanwil Kemenkumham Sumsel	43
4.1.4 Tugas dan Fungsi Bidang	44
4.1.5 Struktur Organisasi	47
4.1.6 Gambaran Umum Lapas Wanita Klas IIA Palembang	48
4.1.7 Gambaran Umum Rupbasan Klas I Palembang	50
4.2 Hasil Pembahasan	51
4.2.1 <i>Input</i>	52
4.2.1.1 Sumber Daya Manusia	53
4.2.1.2 Sumber Daya Aset	56
4.2.1.3 Kebijakan Pemanfaatan BMN	60
4.2.1.4 Mitra Pemanfaatan BMN	62
4.2.2 Proses	64
4.2.2.1 Proses Pengajuan Pemanfaatan BMN	65
4.2.2.2 Proses Penentuan Harga BMN yang Dimanfaatkan	70
4.2.2.3 Proses Persetujuan dan Penetapan Pemanfaatan BM	72
4.2.2.4 Pengawasan pada BMN yang Dimanfaatkan	73
4.2.3 <i>Output</i>	75
4.2.4 Umpan Balik	78
BAB V	
PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1	: Barang Milik Negara Kanwil Kemenkumham Sumsel 3
Tabel 2	: Realisasi PNBPN Kanwil Kemenkumham Sumsel Per Triwulan I TA 2017 4
Tabel 3	: Realisasi PNBPN Lapas Wanita Klas IIA Palembang TA 2016 5
Tabel 4	: Barang Milik Negara Lapas Wanita Klas IIA Palembang 6
Tabel 5	: Realisasi PNBPN Rupbasan Klas I Palembang TA 2016 6
Tabel 6	: Jadwal Penelitian 27
Tabel 7	: Penelitian Terdahulu 28
Tabel 8	: Fokus Penelitian..... 33
Tabel 9	: Tim Khusus Pengelolaan dan Pemanfaatan BMN Kanwil Kemenkumham Sumsel 54
Tabel 10	: Tim Khusus Pengelolaan dan Pemanfaatan BMN Lapas Wanita Klas IIA Palembang..... 55
Tabel 11	: Tim Khusus Pengelolaan dan Pemanfaatan BMN Rupbasan Klas I Palembang 56
Tabel 12	: Kondisi BMN Lapas Wanita Klas IIA Palembang 59
Tabel 13	: Kondisi BMN Rupbasan Klas I Palembang 60
Tabel 14	: Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN 64
Tabel 15	: Harga Sewa BMN Lapas Wanita Klas IIA Palembang 71
Tabel 16	: Pihak yang Terlibat dalam Persetujuan dan Penetapan Pelaksanaan Sewa BMN 73
Tabel 17	: Realisasi PNBPN Lapas Wanita Klas IIA Palembang TA 2016-2017.... 75
Tabel 18	: Realisasi PNBPN Rupbasan Klas I Palembang TA 2016-2017..... 77

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1 : Struktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Berdasarkan pada Mekanisme Pengelolaannya	12
Gambar 2 : Kerangka Pemikiran Penelitian Efektivitas Pemanfaatan Barang Millik Negara dalam Meningkatkan Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) Kanwil Kemenkumham Sumsel Berdasarkan Teori Efektivitas oleh James L.Gibson	29
Gambar 3 Struktur Organisasi Lapas Wanita Klas I Palembang	49
Gambar 4 Struktur Organisasi Rupbasan Klas I Palembang	51
Gambar 5 Bangunan Toko Roti Gallery dan Salon Nyalon yang Merupakan Bangunan yang Disewakan oleh Lapas Wanita Klas IIA Palembang Kepada Mitra Pemanfaatan Barang Milik Negara	58
Gambar 6 Hubungan antar dimensi	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	halaman
1. Barang Milik Negara Berupa Bangunan dan Tanah Kanwil Kemenkumham Sumsel.....	85
2. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan per Triwulan Pertama TA 2017.....	88
3. Perhitungan Tarif Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan Lapas Wanita Klas IIA Palembang	89
4. Laporan Realisasi PNBP Rupbasan Klas I Palembang 2016	90
5. Laporan Realisasi PNBP Rupbasan Klas I Palembang 2017	91
6. Peraturan Menteri Keuangan No.78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara	92
7. Foto Rumah Dinas Lapas Wanita Klas IIA Palembang	111
8. Foto Rumah Dinas Rupbasan Klas I Palembang	112
9. Pedoman Wawancara	113
10. Pedoman Observasi	115
11. Pedoman Dokumentasi	116
12. Kartu Bimbingan Seminar Proposal.....	117
13. Lembar Revisian Seminar Proposal	119
14. Kartu Bimbingan Skripsi	120
15. Lembar Revisian Ujian Skripsi	122

DAFTAR SINGKATAN

1. Kemenkumham RI = Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
2. Kanwil Kemenkumham Sumsel = Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
3. PNBP = Penerimaan Negara Bukan Pajak
4. BMN = Barang Milik Negara
5. Satker = Satuan Kerja
6. Lapas = Lembaga Pemasyarakatan
7. Kalapas = Kepala Lembaga Pemasyarakatan
8. Kabag TU = Kepala Bagian Tata Usaha
9. Rupbasan = Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan Negara
10. Dirjen = Direktorat Jenderal
11. Dirjen PP = Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
12. BPHN = Badan Pembinaan Hukum Nasional
13. KPKNL = Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
14. Balitbang Hukum dan HAM = Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi pemerintah memerlukan berbagai sumber daya untuk mendukung semua kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan. Salah satu sumber daya yang diperlukan oleh organisasi pemerintah ialah sumber daya penerimaan. Sumber daya penerimaan organisasi pemerintah dapat berasal dari berbagai sumber antara lain, sumber daya penerimaan yang berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan hibah dan pendapatan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya berbagai jenis sumber daya penerimaan tersebut, organisasi pemerintah diharapkan tidak hanya mengandalkan satu sumber sebagai sumber penerimaannya, namun juga dapat melihat peluang pada sumber penerimaan yang lain agar dapat memaksimalkan pendapatan di berbagai sumber yang ada, sehingga organisasi pemerintah dapat menjalankan tugas dan kegiatannya dengan baik dalam mencapai tujuannya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan atau yang disingkat Kanwil Kemenkumham Sumsel merupakan salah satu organisasi pemerintah vertikal yang menjalankan tugas Kementerian Hukum dan HAM RI di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kanwil Kemenkumham Sumsel juga memerlukan sumber penerimaan sebagai salah satu sumber daya untuk mendukung berjalannya kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan.

Sumber penerimaan Kanwil Kemenkumham Sumsel ini berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari 27 satuan kerja atau yang disingkat satker yang ada dibawahnya, yaitu 24 satker pemasyarakatan(PAS), 2 kantor imigrasi dan 1 kantor wilayah yang membawai 10 satker gabungan. PNBP itu sendiri terdiri dari;

1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah

2. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah
3. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah
4. Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri, antara lain ;
 - a. Pendapatan dari pengelolaan barang milik negara (BMN) serta pendapatan penjualan, dan
 - b. Pendapatan bunga

Sumber penerimaan utama Kanwil Kemenkumham Sumsel masih mengandalkan pendapatan dari pelayanan jasa berupa pembuatan visa, dan paspor yang berasal dari 2 kantor imigrasi di Sumatera Selatan. Padahal di tahun 2016, Pemerintah telah membuat keputusan mengenai visa gratis bagi wisatawan pada jangka waktu tertentu yang tercantum dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan bahwa Pemerintah Indonesia menambah jumlah negara bebas visa menjadi 169 negara sesuai dengan keputusan tersebut. Dengan adanya peraturan ini, berdampak pula pada penerimaan pendapatan Kanwil Kemenkumham Sumsel pada khususnya dan PNBPN Kemenkumham RI pada umumnya, yang menurun pada tahun 2016 sebesar Rp2,1 triliun dari total target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp3,6 triliun sehingga pada tahun 2017 ini, target penerimaan Kementerian Hukum dan HAM RI diturunkan menjadi Rp2,8 Triliun.

Kementerian Hukum dan HAM RI juga berupaya meningkatkan PNBPN dari sumber pendapatan lain, seperti pengelolaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN). Didalam Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan No.78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN, dijelaskan bahwa organisasi pemerintah dapat melakukan pemanfaatan pada barang milik negaranya berupa tanah dan bangunan dengan prinsip utama bahwa aset tersebut tidak digunakan oleh organisasi pemerintah untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Selain

itu, tujuan utama pemanfaatan BMN ini ialah untuk meningkatkan penerimaan negara karena pemanfaatan BMN merupakan salah satu PNBPN yang bisa didapat oleh organisasi pemerintah, serta untuk mencegah adanya BMN *idle* atau BMN yang tidak digunakan oleh organisasi pemerintah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, dan dibiarkan saja tanpa ada pengelolaan ataupun pemanfaatan pada barang milik negara tersebut.

Kanwil Kemenkumham Sumsel melakukan pemanfaatan pada barang milik negara yang ada pada 27 satkernya. Jumlah barang milik negara yang ada di Kanwil Kemenkumham Sumsel dapat dilihat pada tabel 1 berikut ;

Tabel 1 : Barang Milik Negara Kanwil Kemenkumham Sumsel

No.	Nama Barang	Jumlah Barang
1.	Rumah Dinas	305
2.	Asrama Permanen	7
3.	Asrama Darurat	2
4.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	5
5.	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1
6.	Gedung Olahraga Permanen	1
7.	Bangunan Gedung PAS	58
8.	Gedung Tahanan Karantina	1
9.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	52
10.	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	6
11.	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	1
12.	Gudang Tertutup Permanen	3
13.	Gedung Terbuka Permanen	2
14.	Bangunan Bengkel	2
15.	Gedung Instalasi Pemancar	1
16.	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	1
17.	Bangun Rumah Sakit Khusus	2
Total		450

Sumber : Data Barang Milik Negara Kanwil Kemenkumham Sumsel pada 27 satker

Jumlah barang milik negara Kanwil Kemenkumham Sumsel berjumlah 450, dari 17 jenis barang milik negara yang berupa gedung dan bangunan. Namun, dari jumlah barang milik negara tersebut, penyewaan rumah dinas masih menjadi BMN prioritas yang dimanfaatkan oleh Kanwil Kemenkumham Sumsel. Padahal pemanfaatan BMN tidak hanya sebatas penyewaan rumah dinas. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.78/PMK.06/2014 Tentang Pemanfaatan BMN, jenis pemanfaatan BMN yaitu ;

1. Penyewaan Barang Milik Negara

2. Pinjam Pakai
3. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
4. Bangun Serah Guna
5. Bangun Guna Serah

Jenis pemanfaatan barang milik negara ini dapat dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Sumsel pada barang milik negaranya yang berupa tanah dan bangunan. Dalam pemanfaatan barang milik negara berupa bangunan dan gedung, jenis pemanfaatan yang dapat dilakukan ialah sewa, KSP, dan pinjam pakai. Sedangkan pada tanah, jenis pemanfaatan barang milik negara yang bisa dilakukan ialah sewa, bangun serah guna dan bangun guna serah. Satuan Kerja Kanwil Kemenkumham Sumsel yang berjumlah 27 satker melakukan pemanfaatan pada barang milik negaranya, dan hampir semua satker hanya memanfaatkan rumah dinas dengan cara melakukan penyewaan. Hal ini pun berpengaruh pada penerimaan negara yang diterima Kanwil Kemenkumham Sumsel yang berasal dari pemanfaatan barang milik negara secara menyeluruh di 27 satker yang masih rendah. Realisasi PNBP Kanwil Kemenkumham Sumsel dapat dilihat pada tabel 2 berikut ;

Tabel 2 : Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Menurut Akun Kanwil Kemenkumham Sumsel per Triwulan 1 TA 2017

Jenis PNBP	Jumlah (Rp)	Persentase
Pengelolaan BMN - Pemanfaatan BMN - Sewa Rumah Dinas	27.389.975	0,37 %
Pelayanan Jasa Visa, dan Paspor	7.277.754.233	99,56 %
Pelayanan Jasa Lainnya	1.274.000	0,017 %
TAYL (Tahun Anggaran Yang Lalu)	2.966.100	0,04 %
Jumlah	7.309.384.308	100 %

Sumber : Realisasi PNBP Kanwil Kemenkumham Sumsel Triwulan I Tahun 2017

Persentase terbesar kedua dari PNBP Kanwil Kemenkumham Sumsel merupakan hasil dari pemanfaatan barang milik negara yang ada di 27 satker. Meskipun belum mencapai 1% dari total pendapatan Kanwil Kemenkumham Sumsel secara menyeluruh, namun hal ini menandakan bahwa adanya peluang dalam mengelola BMN dalam meningkatkan PNBP Kanwil Kemenkumham Sumsel. Dari 27 satker tersebut, hanya ada 2

satker yang melakukan pemanfaatan BMN pada aset negara lainnya, yaitu Lapas Wanita Klas IIA Kota Palembang, dan Kantor Imigrasi Klas I Kota Palembang. Sedangkan ada satu satker yang hanya memanfaatkan 1 Rumah dinas yang dimiliki, yaitu Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara atau Rupbasan Klas I Kota Palembang.

Lapas Wanita Klas IIA Palembang merupakan satker yang memanfaatkan seluruh aset bangunan yang dimiliki baik untuk melakukan kegiatan operasional maupun pemanfaatan dalam meningkatkan PNBP, termasuk aset bangunan gedung kantor yang dimanfaatkan pada dua sisi depan untuk dikelola dan disewa oleh mitra pemanfaatan dan satu ruang pada bangunan gedung lapas wanita yang disewakan untuk bangunan koperasi. Dengan begitu, Lapas Wanita mendapatkan sumber penerimaan dari pemanfaatan barang milik negaranya. Realisasi PNBP Lapas Wanita Klas IIA Kota Palembang dapat dilihat pada tabel 3 berikut ;

Tabel 3 : Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Menurut Akun Lapas Wanita Klas IIA Kota Palembang TA 2016

Jenis PNBP	Jumlah (Rp)	Persentase
Pengelolaan BMN		
- Pemanfaatan BMN		
- Sewa Rumah Dinas	9.503.835	19,48 %
- Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	27.544.000	56,44 %
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, dan Teknologi Sesuai dengan Tugas dan Fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga	5.953.500	12,20%
Pendapatan Penjualan Lainnya	356.500	0,73 %
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Yang Lalu	5.442.000	11,15 %
Jumlah	48.799.835	100 %

Sumber : Realisasi PNBP Lapas Wanita Klas IIA Palembang TA 2016

PNBP Lapas Wanita Klas IIA Kota Palembang yang berasal dari pemanfaatan BMN merupakan penerimaan utama yang diterima oleh Lapas Wanita Klas IIA Palembang. Selain untuk meningkatkan penerimaan Lapas Wanita Klas IIA Palembang, pemanfaatan BMN juga memberi keuntungan lain untuk Lapas Wanita Klas IIA Palembang, yaitu adanya Pelatihan dan Pengembangan diri yang diberikan oleh Mitra Pemanfaatan BMN kepada para narapidana di Lapas Wanita Klas IIA Palembang sesuai

dengan MoU yang telah disepakati oleh Mitra Pemanfaatan BMN dan Kepala Lapas Wanita Klas IIA Palembang. Barang milik negara yang dimiliki oleh Lapas Wanita Klas IIA Palembang berupa tanah dan bangunan ialah dapat dilihat pada tabel 4 berikut ;

Tabel 4 : Barang Milik Negara Lapas Wanitas Klas IIA Palembang

No.	Nama Barang	Jumlah dan Luas barang	Keterangan
1.	Tanah Bangunan	5.062 m ²	Dimanfaatkan untuk : - 98,23 m ² tanah disewakan untuk toko Gallery
2.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 unit	Dimanfaatkan untuk : - 51,30 m ² disewakan untuk bangunan Salon (pada posisi depan kanan bagian kantor). - 57,36 m ² disewakan untuk bangunan Gallery (pada posisi depan kiri bagian kantor). Dan sebagian gedung Gallery merupakan bangunan serah guna.
3.	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Lainnya	1 unit	Digunakan untuk kegiatan operasional kantor
4.	Bangunan Gedung Lapas	1 unit	Dimanfaatkan untuk : - 26,48 m ² disewakan untuk bangunan koperasi - 85,87 m ² disewakan untuk dapur kegiatan kerja
5.	Rumah Negara	12 unit	Dimanfaatkan untuk : - 12 unit rumah dinas disewakan kepada para pimpinan dan pegawai Lapas Wanita Klas IIA Palembang
6.	Gedung Pos Jaga Permanen	1 unit	Digunakan untuk kegiatan operasional

Sumber : Data Barang Milik Negara Lapas Wanita Klas IIA Kota Palembang

Berbeda dengan Lapas Wanita Klas IIA Palembang, satuan kerja Rupbasan Klas I Palembang hanya memanfaatkan 1 rumah dinas yang dimilikinya, hal itu juga berdampak pada PNBP yang diterima oleh Rupbasan Klas I Palembang yang rendah, realisasi PNBP Rupbasan Klas I Palembang dapat dilihat pada tabel 5 berikut ;

Tabel 5 : Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Menurut Akun Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas I Palembang TA 2016

Jenis PNBP	Jumlah (Rp)	Persentase
Pengelolaan BMN - Pemanfaatan BMN - Sewa Rumah Dinas	1.044.300	29,6%
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu	2.481.600	70,4 %
Jumlah	3.525.900	100%

Sumber : Realisasi PNBP Rupbasan Klas I Kota Palembang TA 2016

Berdasarkan penjelasan perbedaan kedua satker di Kanwil Kemenkumham Sumsel tersebut, dapat dilihat bahwa pemanfaatan BMN di jajaran satker Kanwil Kemenkumham Sumsel belum maksimal. Hal ini terlihat dari jumlah BMN yang dimanfaatkan masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah BMN yang dimiliki serta hanya ada 2 satker dari 27 satker Kanwil Kemenkumham Sumsel yang tidak hanya memanfaatkan rumah dinas. Tentunya hal ini berdampak pada penerimaan yang didapat pada sektor pemanfaatan barang milik negara masih belum optimal. Alasan inilah yang mendorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pemanfaatan BMN dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Bukan Pajak Kanwil Kemenkumham Sumsel.” Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai penelitian ini, peneliti membandingkan 2 satker yaitu Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang sebagai satker yang paling banyak memanfaatkan barang milik negara, dan Rupbasan Kelas I Palembang sebagai satker yang paling sedikit memanfaatkan BMN yang dimilikinya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi batasan-batasan yang jelas dan tegas dalam memanfaatkan BMN di Kanwil Kemenkumham Sumsel untuk mengefektifkan pendapatan organisasi. Dengan begitu, kendala-kendala yang terjadi dapat diatasi dan memunculkan pemanfaatan BMN yang efektif serta dapat meningkatkan penerimaan pendapatan organisasi. Pada akhirnya, kendala-kendala yang ada dalam upaya pengefektifan pemanfaatan BMN dapat diidentifikasi dengan baik sehingga kedepannya dapat meningkatkan PNBK Kanwil Kemenkumham Sumsel.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pemanfaatan BMN dalam meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kanwil Kemenkumham Sumsel ?

2. Apa kendala dalam pemanfaatan BMN untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kanwil Kemenkumham Sumsel ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan barang milik negara dalam meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Kanwil Kemenkumham Sumsel.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi untuk mencapai pemanfaatan barang milik negara yang efektif dalam meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Kanwil Kemenkumham Sumsel.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran kepada akademisi Ilmu Administrasi Negara, terutama konsentrasi Administrasi Keuangan Negara tentang efektivitas pemanfaatan barang milik negara dalam meningkatkan penerimaan negara bukan pajak Kanwil Kemenkumham Sumsel.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini kiranya dapat digunakan untuk membantu dan memberikan informasi bagi pihak-pihak yang terkait baik itu Kanwil Kemenkumham Sumsel, kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, pemerintah lainnya dan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Danim, Sudarman. 2004. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Gibson, James L. 1990. *Organisasi : Perilaku, Struktur, Proses*. Jakarta: Erlangga
- Halim, Abdul dkk. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta : Salemba
- Keban, Yermias. T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, Dan Isu*. Yogyakarta : Gavamedia
- P. Robbins, Stephen. 2008. *Organizational Behaviour, Tenth Edition (Perilaku Organisasi Edisi ke Sepuluh)*, Alih Bahasa Drs. Benyamin Molan. Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta : Bandung
- _____. 2014. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Suparmoko, M. 2013. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek Edisi Keenam*. Yogyakarta : FEB UGM
- Sutarto. 2015. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Torang, Syamsir. 2013. *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*. Bandung : Alfabeta
- Handoko, T. Hani. 2012. *Manajemen*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada

Jurnal

- Tommy. 2015. *Pengelolaan Barang Milik Negara pada Koantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan*. Kanwil Kemenkumham Sumsel

Perundang- Undangan/ Peraturan

- Buku Panduan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
- Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
- Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara
- Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Skripsi

Rahmawati,Hilda.2016.*Efektivitas Pengelolaan Anggaran PNBP oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palembang dalam Upaya Meningkatkan PNBP Tahun 2014*. Skripsi. Inderalaya:Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

Widia.2014.*Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pekan Panutan PBB oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang tahun 2014*. Skripsi. Inderalaya:Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

Internet

Basri, Mahenggiyang Bustan.2017. Universitas Hasanuddin : *Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak*,(online), (repository.unhas.ac.id/handle ,diakses pada tanggal 15 Oktober 2017)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia.2016. *Kebijakan Pengelolaan PNBP*,(online), (www.anggaran.depkeu.go.id/publikasi, diakses pada tanggal 15 Oktober 2017)

Ratna.2017. Universitas Mulawarman : *Studi Tentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (BMN) Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNL) Samarinda*(online) (ejurnal.an-fisip-unmul.ac.id/2017/05, diakses pada tanggal 19 Juni 2017)

Ristekdikti.2016.*Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah*(online), (itjen.ristekdikti.go.id/uploads/2016/01,diakses pada tanggal 15 Oktober 2017)